



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NOMOR : 03 / 800.2.4:1 / 12 / P.III-B.III / 34 / 2026

Menteri Dalam Negeri, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan ketentuan-ketentuannya, menyatakan bahwa



n a m a	:	Maulida Rachmawati, S.Pi
tempat / tanggal lahir	:	Gresik, 12 Agustus 1994
NIP	:	199408122025042001
pangkat / gol.ruang	:	Penata Muda (III/a)
j a b a t a n	:	Perencana Ahli Pertama
i n s t a n s i	:	Pemerintah Kabupaten Gresik

TELAH MENGIKUTI

pada Pelatihan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dari tanggal 8 sampai dengan 12 Juni 2026 secara tatap muka di Yogyakarta, yang meliputi 50 jam pembelajaran.



Jakarta, 12 Juni 2026

a.n. Menteri Dalam Negeri

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sugeng Hariyono



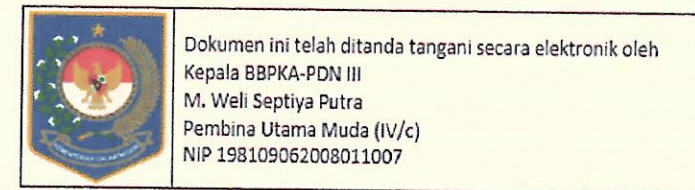
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah

DAFTAR MATA PELATIHAN

NO	MATA PELATIHAN	JAM PELAJARAN
1.	<i>Building Learning Commitment</i>	2
2.	<i>Best Practice</i> : Implementasi SAKIP (Filosofi dan Langkah Konkrit)	2
3.	Implementasi SAKIP (Pemanfaatan Teknologi Informasi dan SAKIP yang Berdampak)	3
4.	Pelaporan Kinerja (Penyusunan Laporan Kinerja - LKJIP Perangkat Daerah)	3
5.	Pelaporan Kinerja (Penyusunan Laporan Kinerja - Perjanjian Kinerja Gubernur dan Perangkat Daerah)	2
6.	Ceramah Peran Strategis SAKIP dalam Mendukung Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	2
7.	Penguatan Evaluasi SAKIP sebagai Instrumen Pengendalian Kinerja dan Reformasi Birokrasi	8
8.	Strategi Peningkatan Implementasi SAKIP	5
9.	<i>Desk Pohon</i> Kinerja	15
10.	Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kinerja Berbasis Data SAKIP	5
11.	Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah	3

Yogyakarta, 12 Juni 2026

Kepala BBPKA – PDN III



Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku, Dokumen ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik Menggunakan Sertifikat Elektronik yang Diterbitkan Oleh BSrE Sehingga tidak Diperlukan Tandatangan dengan Stempel Basah.